

## Model Kebijakan *Mixed Scanning* Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Banten Yang Berkelanjutan

Maghfira Nur Reviana<sup>1)</sup>, Ipah Ema Jumiati<sup>2)</sup>, Diviani Salsabilla<sup>3)</sup>, Ardi Prasetyo<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: [maghfiranr06@gmail.com](mailto:maghfiranr06@gmail.com)

(Diterima Desember 2024; Disetujui Februari 2025; Dipublikasikan Maret 2025)

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Banten Lama, Provinsi Banten, menggunakan model mixed scanning. Banten Lama, sebagai kawasan cagar budaya, memiliki potensi besar untuk pariwisata sejarah dan religi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen dan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan strategis telah dirumuskan dengan baik melalui MoU 2017 dan Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2014, implementasinya di lapangan lebih bersifat inkremental dan adaptif terhadap berbagai kendala, seperti koordinasi antar lembaga, konflik kepentingan, dan kapasitas sumber daya manusia. Model mixed scanning terbukti relevan dalam menganalisis kompleksitas ini, memungkinkan penyesuaian strategi sambil tetap berpegang pada tujuan jangka panjang. Penelitian merekomendasikan pembentukan badan pengelola khusus untuk Banten Lama, penyusunan SOP yang baku, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penegakan aturan yang tegas untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi Banten Lama sebagai destinasi unggulan.*

**Kata Kunci:** *mixed scanning, kebijakan pariwisata, banten lama, implementasi kebijakan, cagar budaya*

### Abstract

*This study analyzes the implementation of tourism development policies in Banten Lama, Banten Province, using a mixed scanning model. Banten Lama, as a cultural heritage area, has great potential for historical and religious tourism. This research aims to evaluate the effectiveness of policy implementation and identify challenges faced. The research method used is descriptive analysis with primary data obtained through interviews and secondary data from documents and archives. The results show that although the strategic policy has been well formulated through the 2017 MoU and Serang City Regional Regulation No. 14/2014, its implementation in the field is more incremental and adaptive to various obstacles, such as inter-agency coordination, conflicts of interest, and human resource capacity. The mixed scanning model proved relevant in analyzing this complexity, allowing for strategy adjustments while sticking to long-term goals. The research recommends the establishment of a special management agency for Banten Lama, the preparation of standardized SOPs, empowerment of local communities, and strict enforcement of rules to realize sustainable tourism governance and optimization of Banten Lama's potential as a leading destination.*

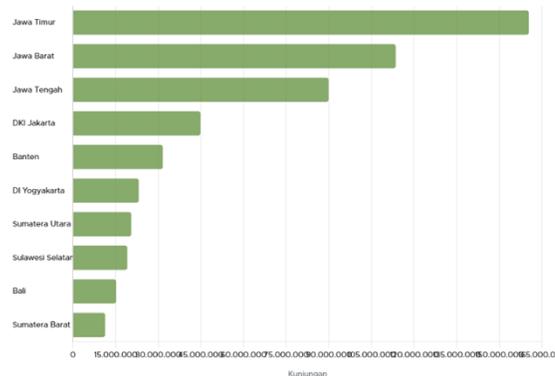
**Keywords:** *mixed scanning, tourism policy, banten lama, policy implementation, cultural heritage*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa sebagai negara kepulauan terbesar, dengan keanekaragaman budaya, sejarah, dan alam yang menjadi daya tarik utama, seperti Bali, Yogyakarta, Raja Ampat, dan Taman Nasional Komodo. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan sektor ini akan menjadi sumber devisa terbesar pada 2024, mencapai Rp113 triliun, yang diharapkan berdampak positif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama. Pasca pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan mulai pulih, didukung promosi destinasi baru dan peningkatan kualitas layanan. Kebijakan pariwisata Indonesia menekankan keberlanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam ekosistem pariwisata dan memanfaatkan program seperti Wonderful Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta alam ke pasar global.

Menurut temuan World Economic Forum (WEF), pembangunan pariwisata di negara-negara dengan peringkat tinggi didukung oleh lingkungan bisnis yang kondusif dan kesiapan teknologi yang baik. Namun, tantangan serupa juga dihadapi, seperti keterbatasan tenaga kerja terampil di sektor pariwisata. Jepang, misalnya, terus mengalami penurunan skor pada pilar sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja sejak tahun 2019, yang menjadi salah satu hambatan utama mereka saat ini (Goodstats.id, diakses 12 Desember 2024). Di sisi lain, Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan resiliensi sektor pariwisatanya pasca pandemi. Pada TTDI 2024, Indonesia naik 10 peringkat ke posisi ke-22 (4,46), mencatat total kenaikan 20 peringkat sejak TTDI 2019. Tren ini mencerminkan kemajuan signifikan yang konsisten dalam dua edisi terakhir. Dengan berbagai tantangan global yang dihadapi, laporan ini memberikan gambaran perubahan peringkat sekaligus faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pembangunan pariwisata di berbagai negara.

**Gambar 1. 10 Provinsi Tujuan wisatawan Nusantara Terbanyak (Januari 2023-September 2023)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data dalam grafik 10 provinsi tujuan wisatawan nusantara terbanyak selama periode Januari hingga September 2023, Provinsi Banten menempati posisi kelima. Hal ini menunjukkan bahwa Banten menjadi salah satu destinasi wisata domestik yang diminati, meskipun tidak sebesar provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah yang menduduki posisi teratas. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018-2015 bahwa



Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah total wisatawan yang berkunjung ke berbagai daerah di Provinsi Banten tercatat sebanyak 773 kunjungan. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Serang mencatat angka tertinggi dengan 136 kunjungan, diikuti oleh Kabupaten Lebak dengan 119 kunjungan dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 116 kunjungan. Kota Serang juga menunjukkan performa baik dengan 126 kunjungan, sedangkan Kabupaten Tangerang mencatat 112 kunjungan. Kota Cilegon dan Kota Tangerang masing-masing mencatat 52 kunjungan dan 41 kunjungan, sementara Kota Tangerang Selatan memiliki angka kunjungan terendah, yakni 20 kunjungan. Data ini menunjukkan bahwa daerah kabupaten cenderung lebih diminati dibandingkan wilayah kota, dengan Kabupaten Serang dan Lebak sebagai destinasi unggulan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa daya tarik wisata alam atau budaya di wilayah kabupaten lebih dominan dibandingkan potensi wisata perkotaan. Upaya strategis untuk meningkatkan kunjungan ke daerah kota, terutama Tangerang Selatan, dapat dilakukan melalui promosi pariwisata yang lebih intensif dan pengembangan atraksi wisata yang menarik.

**Tabel 2. 7 Wonders Of Banten 2023**

<b>Objek Wisata</b>	<b>Daerah</b>
Anyer	Kab. Serang
Sawarna	Kab. Lebak
Banten Lama	Kota Serang
Desa Wisata Baduy	Kab. Lebak
Cisadane	Prov. Banten
Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang
Ujung Kulon	Kab. Pandeglang

*Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2023*

Berdasarkan data di atas mengenai tujuh objek wisata unggulan di Provinsi Banten yang mewakili keunikan budaya, sejarah, dan keindahan alam daerah tersebut. Objek wisata Anyer di Kabupaten Serang dikenal akan pantai dan resor tepi lautnya yang ikonik. Desa Sawarna di Kabupaten Lebak menawarkan pesona alam berupa pantai dan gua yang eksotis, sementara Desa Wisata Baduy di kabupaten yang sama memancarkan daya tarik budaya dengan kehidupan tradisional masyarakat Baduy. Banten Lama di Kota Serang merupakan kawasan bersejarah yang menyimpan jejak kejayaan Kesultanan Banten. Sungai Cisadane, yang melintasi Provinsi Banten, menjadi simbol ekowisata dengan daya tarik pemandangan sungainya. Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang adalah destinasi wisata pantai eksklusif yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus pariwisata. Ujung Kulon, juga di Kabupaten Pandeglang, merupakan Taman Nasional yang terkenal dengan keberadaan badak Jawa dan keanekaragaman hayati lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Banten Lama sebagai locus penelitian, mengingat potensi kawasan ini sebagai destinasi wisata sejarah yang strategis dan representatif dalam merepresentasikan keunikan budaya Banten. Banten Lama dianggap mampu menjadi fokus kajian untuk menggali lebih dalam mengenai potensi wisata berbasis sejarah dan nilai budaya yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen, arsip, jurnal, dan buku yang relevan. Subjek penelitian melibatkan pihak-pihak terkait di Dinas

Pariwisata Provinsi Banten, dengan objek penelitian mencakup aspek kepariwisataan di Provinsi Banten, khususnya Banten Lama.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Survei, dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.
3. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Newman (2000:145) mengatakan bahwa “*Qualitative data are empirical. They involve documenting real events, recording what people say (with words, gestures, and tone), observing specific behaviors, studying written documents, or examining visual images*” (Bobby Newman Dana R. Reincke Deborah L. Meinberg, 2000). Karena data dalam penelitian kualitatif bersifat empiris (diperoleh melalui observasi lapangan terhadap objek penelitian), pengumpulan data dilakukan langsung dari lapangan untuk mendapatkan data dan teori. Teknik analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode *Multiple Levels of Analysis* (John W. Creswell, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pariwisata di Provinsi Banten (Studi Kasus Banten Lama)**

Menurut James Anderson, seperti yang dikutip oleh Tachjan (2006: 24-25), implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai penerapan kebijakan oleh aparat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, kebijakan perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara hukum. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut memiliki daya paksa dan dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. (Susiana, 2018).

Revitalisasi dan penataan kawasan wisata cagar budaya Banten Lama saat ini melibatkan kerjasama sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Serang. Sebagai langkah awal, pada 4 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan nomor 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017, dan 516/MOU.24-HUK-2017. MoU ini bertujuan menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan revitalisasi kawasan Keraton Kesultanan Banten. Fokusnya adalah melestarikan cagar budaya di Provinsi Banten, mempererat kerjasama antar pemerintah di berbagai tingkatan, memelihara warisan sejarah Kawasan Keraton Kesultanan, serta meningkatkan kualitas destinasi wisata di Banten Lama.

MoU tersebut tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga berperan sebagai media komunikasi strategis yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Pelaksanaannya menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memastikan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Banten Lama berjalan efektif. Namun, dalam praktiknya, kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata Banten Lama menghadapi berbagai kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya tingkat keterlibatan birokrasi yang kompleks, di mana setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. PERKIM Provinsi Banten, misalnya, bertindak sebagai koordinator utama dalam penataan kawasan, dengan didukung oleh dinas terkait untuk merestorasi berbagai situs bersejarah, seperti Masjid Agung Banten Lama, Istana Keraton Surosowan, Benteng Speelwick, Vihara Klenteng Avalokiteswara, Masjid Pecinan, dan Keraton Kaibon. Sementara itu, Pemerintah Kota Serang mengelola penataan terminal Sukadiri dan kawasan penunjang wisata, sedangkan Kenadziran bertanggung jawab atas pengelolaan Masjid Agung Banten. (Pakhudin et al., 2022),

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Banten Lama berjalan lancar berkat peran aktif Gubernur Banten dan Walikota Serang dalam mengarahkan birokrasi, meskipun kelembagaan pariwisata di Kota Serang masih menghadapi kendala. Struktur organisasi Disparpora yang menggabungkan pengelolaan pariwisata dengan bidang Pemuda dan Olahraga mengurangi fokus pada pariwisata, diperparah oleh minimnya staf dengan keahlian khusus di bidang ini. Banyak staf memiliki latar belakang pendidikan yang kurang relevan, sehingga pemahaman terhadap konsep kebijakan pariwisata makro masih rendah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Serang meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan dan studi banding ke daerah yang telah berhasil mengelola pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kota Serang telah dirumuskan melalui Perda No. 14 Tahun 2014 dan melibatkan mekanisme kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, BPCB Banten, dan Kenadziran. Meski kebijakan telah disosialisasikan, implementasinya menghadapi kendala, seperti kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat dan konflik antara pemangku kepentingan terkait penggunaan zona wisata serta pengelolaan parkir. Pemerintah Provinsi fokus pada revitalisasi kawasan inti, Kota Serang pada pengembangan fasilitas penunjang, BPCB pada pelestarian cagar budaya, dan Kenadziran pada pengelolaan aktivitas keagamaan. Berkat dukungan pendanaan dari berbagai sumber, kawasan Banten Lama kini lebih tertata, meski keberhasilan penuh bergantung pada koordinasi dan kesamaan pemahaman antar pihak.

Fasilitas di kawasan Banten Lama, seperti penataan Masjid Agung, Istana Keraton Surosowan, dan Benteng Speelwijk, telah dibangun, namun beberapa fasilitas seperti kios dan Tourism Information Center (TIC) belum berfungsi optimal. Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis kebudayaan dan keagamaan, dengan atraksi unik seperti Debus, Patingtung, dan Masjid Agung Banten yang masih aktif. Namun, tantangan muncul dari kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, seperti penolakan pedagang kreatif lapangan (PKL) untuk direlokasi serta masalah parkir liar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan kesadaran akan tata kelola yang baik.

Penegakan aturan yang lebih tegas juga diperlukan untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya pembentukan kelembagaan khusus untuk pengelolaan pariwisata Banten Lama menjadi langkah strategis yang mendesak. Kelembagaan ini dapat memperkuat koordinasi antar pihak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata dapat diimplementasikan secara efektif demi mendukung Banten Lama sebagai destinasi unggulan. Pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah. Mereka bertugas menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai birokrat serta aktif mengoordinasikan aspek teknis pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai organisasi pelaksana. Kompleksitas struktur birokrasi sering kali menghasilkan beragam kecenderungan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten telah mengambil langkah antisipatif dalam pengelolaan pariwisata Banten Lama melalui komunikasi berkelanjutan dan supervisi oleh ASDA 1 serta Dinas PERKIM, meskipun tantangan utama berupa ketiadaan SOP baku masih ada. Pembentukan badan khusus untuk mengelola kawasan pariwisata Banten Lama sangat penting, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengamanatkan pengelolaan kawasan cagar budaya oleh badan pengelola. Badan ini diharapkan melibatkan berbagai pihak dan berkoordinasi untuk mengembangkan potensi pariwisata secara

berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara aspek budaya, sejarah, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## 2. Analisis Implementasi Kebijakan Pariwisata di Banten Lama dengan Model Mixed Scanning

Pengembangan kawasan wisata Banten Lama merupakan langkah strategis dalam melestarikan warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menata dan mengelola kawasan ini, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan koordinasi antar lembaga. Untuk menganalisis dinamika ini, pendekatan mixed scanning yang menggabungkan analisis komprehensif dan inkremental, dapat digunakan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pariwisata di Banten Lama (Etzioni, 1967; Tachjan, 2006).

Dalam model *mixed scanning*, analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan makro untuk kebijakan strategis dan pendekatan mikro untuk kebijakan operasional.

Pada tataran strategis, kebijakan revitalisasi kawasan Banten Lama berlandaskan pada MoU tahun 2017 antara berbagai pihak, yang menetapkan kerangka hukum dan arah kebijakan jangka panjang (Pakhudin et al., 2022). Strategi ini mencakup pelestarian situs cagar budaya, peningkatan infrastruktur wisata, dan penguatan daya tarik budaya serta religi kawasan. Fokus utama kebijakan ini adalah menjadikan Banten Lama sebagai destinasi unggulan, sesuai dengan Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2014. Namun, pada tataran operasional pendekatan inkremental menjadi dominan karena implementasi sering kali disesuaikan dengan tantangan praktis di lapangan. Misalnya, kendala pengelolaan kios dan zona parkir liar menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dinas PERKIM Provinsi Banten berperan sebagai koordinator utama dalam penataan kawasan, sementara Pemerintah Kota Serang bertanggung jawab atas fasilitas pendukung. Dalam praktiknya, konflik antara stakeholder, seperti Kenadziran dan PKL, mengharuskan adanya penyesuaian pendekatan dan penerapan kebijakan secara bertahap (Susiana, 2018).

Pendekatan mixed scanning juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala. Sebagai contoh, keberadaan fasilitas seperti *amphitheater* dan *Tourism Information Center* (TIC) yang belum difungsikan secara optimal menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan studi banding ke daerah lain merupakan langkah mikro yang krusial untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif (Pakhudin et al., 2022). Dengan mengombinasikan analisis strategis dan operasional, model *mixed scanning* mampu memberikan panduan yang lebih adaptif dalam mengelola kompleksitas birokrasi dan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang fleksibel dan terarah, sehingga potensi kawasan Banten Lama sebagai destinasi wisata unggulan dapat terealisasi secara berkelanjutan.

### Pembahasan

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan peluang kerja baru. Berdasarkan laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2024), pariwisata diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar dengan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun Banten memiliki potensi besar, seperti destinasi budaya di kawasan Banten Lama, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur,

rendahnya aksesibilitas, dan pengelolaan destinasi yang belum optimal masih menjadi kendala utama.

Formulasi kebijakan adalah proses dalam pembuatan kebijakan di mana berbagai alternatif yang ada dievaluasi dan disaring hingga tersisa beberapa opsi yang dianggap relevan oleh para pembuat kebijakan, terutama pemerintah. (Sutikno, Wijaya & Zaelani, 2020). Formulasi kebijakan mencakup tidak hanya penilaian manfaat dan risiko relatif dari berbagai alternatif kebijakan yang dianggap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kelayakan atau tingkat penerimaan dari opsi tersebut. Dalam konteks kebijakan pariwisata, perumusan kebijakan harus dirancang untuk mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus memastikan pelestarian budaya dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan model *mixed scanning*, yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga secara menyeluruh mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Dalam hasil penelitian (Mebri, Suradinata & Kusworo, 2022), pengembangan pariwisata juga berperan dalam memperkuat kontribusi Dinas Pariwisata dalam menerapkan strategi pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2024), sektor pariwisata diproyeksikan menjadi salah satu sumber devisa terbesar dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun Banten memiliki potensi besar, seperti destinasi budaya di kawasan Banten Lama, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang rendah, serta manajemen destinasi yang belum optimal masih menjadi hambatan. Formulasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan di mana berbagai opsi yang tersedia dipertimbangkan dan kemudian dikurangi menjadi beberapa opsi yang relevan oleh para pelaku kebijakan, khususnya pemerintah. (Sutikno, Wijaya & Zaelani, 2020). Kegiatan formulasi kebijakan tidak hanya mencakup penghitungan manfaat dan risiko relatif dari berbagai opsi kebijakan yang dapat dianggap cocok dengan sasaran kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga menyangkut kelayakan atau penerimaan terhadap opsi tersebut. Kebijakan pariwisata juga harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya serta lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan model *mixed scanning*, yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang secara komprehensif. Dalam hasil penelitian (Mebri, Suradinata & Kusworo, 2022), pengembangan pariwisata juga berperan dalam memperkuat kontribusi Dinas Pariwisata dalam menerapkan strategi pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Patton dan Sawicki dalam (Maulana, Pujiyono & Subiyakto, 2023) mengemukakan ada beberapa kriteria penting yang biasa digunakan untuk memilih alternatif kebijakan, yakni Pertama, harus layak secara teknis (*Technical Feasibility*). Harus menciptakan efektivitas atau mampu menyelesaikan masalah; Kedua, mengedepankan kelangsungan politik (*Political Viability*). Apakah suatu kebijakan tersebut dapat diterima oleh aktor-aktor politik, para klien dan aktor-aktor lainnya. Apakah sudah mengedepan responsivitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; Ketiga, kemungkinan bisa layak secara ekonomi dan keuangan

*Model Kebijakan Mixed Scanning Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Banten Yang Berkelanjutan*

(*Economic and Financial Possibility*), yakni mengedepankan efisiensi dan bisa mampu dijalankan secara pembiayaan; dan yang Keempat, mampu dijalankan secara administrasi (*Administrative Operability*), yakni apakah kebijakan tersebut mampu dijalankan secara administratif.

Kajian oleh (Mulyana, Huraerah & Martiawan, 2019) dalam konteks pengembangan pariwisata di Cianjur Selatan, penerapan model mixed scanning terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Penelitian ini mengungkap bahwa dominasi model inkremental dapat menghambat perkembangan, sedangkan pendekatan rasional-komprehensif yang terlalu teoretis sering kali sulit diimplementasikan secara praktis. *Mixed scanning* muncul sebagai solusi terbaik dengan menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan (Syahrir, 2015) tentang kebijakan retribusi IMTA di Kota Surabaya menunjukkan bahwa model kebijakan inkremental sering kali kurang efektif dalam menghasilkan perubahan yang signifikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan mixed scanning, yang menggabungkan langkah bertahap dengan perencanaan strategis, untuk mempercepat implementasi kebijakan. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi bagi pengembangan pariwisata di Banten, mengingat kebijakan inkremental cenderung mengulang pola lama tanpa inovasi berarti. Dengan perpaduan perencanaan strategis dan implementasi yang praktis, pendekatan mixed scanning dapat menjadi solusi efektif dalam mendorong pengembangan pariwisata di Provinsi Banten. Pendekatan ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga memastikan tercapainya tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, khususnya di kawasan Banten Lama, merupakan upaya strategis untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan perekonomian daerah. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Banten Lama melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga masyarakat dan Kenadziran. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan model *mixed scanning*, yang mengkombinasikan pendekatan komprehensif dan inkremental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran strategis, kebijakan revitalisasi Banten Lama telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu MoU 2017 dan Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2014. Namun, pada tataran operasional, implementasi kebijakan cenderung inkremental dan adaptif terhadap tantangan di lapangan, seperti pengelolaan kios, parkir liar, dan konflik antar pemangku kepentingan. Koordinasi antar lembaga dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

Model *mixed scanning* terbukti relevan dalam menganalisis kompleksitas implementasi kebijakan pariwisata di Banten Lama. Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi sesuai dengan kondisi lapangan, sambil tetap berpegang pada tujuan strategis jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan pengelola khusus untuk Banten Lama, yang melibatkan berbagai unsur, guna meningkatkan koordinasi, efektivitas implementasi, dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Selain itu, diperlukan SOP yang baku untuk pelaksanaan kebijakan agar tindakan pelaksana selaras dan program berjalan efektif. Pemberdayaan masyarakat lokal dan penegakan aturan yang tegas juga penting untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2023

Badan Pusat Statistik, 2024

Bappeda Provinsi Banten, 2023

Bobby Newman Dana R. Reinecke Deborah L. Meinberg. (2000). Self-Management Of Varied Responding In Three Students With Autism, Volume15,(2),6. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-078X\(200004/06\)15:23.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-078X(200004/06)15:23.0.CO;2-3)

Etzioni, A. (1967). Mixed-Scanning: A "Third" Approach To Decision-Making. *Public Administration Review*, 27(5), 385-392.

<https://goodstats.id/article/index-pembangunan-pariwisata-2024-indonesia-salip-belgia-dan-selandia-baru-fl5os>, Diakses 12 Desember 2024

John W. Creswell. (2008). *Research Design\_ Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc. Diambil Dari [https://www.pdfdrive.com/john-w-creswell-research-design\\_-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e24960021.html](https://www.pdfdrive.com/john-w-creswell-research-design_-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e24960021.html)

Maulana Delly, Pujiyono Bambang, & Subiyakto Rud. (2023). FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Administrasi Publik*, 2. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap>

Mebri, F. H., Suradinata, E., & Kusworo, K. (2022). INTERNAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN JAYAPURA CITY PAPUA PROVINCE. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 102–114. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>

Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). MODEL KEBIJAKAN MIXED SCANNING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA CIANJUR SELATAN. *DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 9.

Pakhudin, Arenawati, & Stiawati, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 151–167. <https://doi.org/10.30656/Sawala.V10i1.4096>

Susiana, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi Di Provinsi Jawa Tengah Dan Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Aspirasi*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.22212/Aspirasi.V7i1.1084>

Sutikno Chamid, Wijaya Satwika Shadu, & Zaelani Andi. (2020). Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY*, 4(2).

Syahrir, M. (2015). *MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING*. [www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id)

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.